

**KAJIAN 5 (LIMA) TEPAT PROGRAM BANTUAN SISWA MISKIN
TINGKAT SMA DI SMA NEGERI 9 SEMARANG**

Oleh:

- Satrio Kurniadi Widodo⁽¹⁾, Sri Suwitri⁽²⁾, Hartuti Purnaweni⁽³⁾.
1,2,3) Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Diponegoro
2,3) Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Diponegoro
Doktor Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Diponegoro
3) Magister Ilmu Lingkungan, Sekolah Pascasarjana, Universitas Diponegoro
Doktor Ilmu Lingkungan, Sekolah Pascasarjana, Universitas Diponegoro

**DEPARTEMEN ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

Jalan Profesor Haji Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos 12693
Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465404
Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id
Email: s.kurniadiwidodo@gmail.com

ABSTRACT

Poor student aid program policies which refers to the regulations of president number 15 of 2010 regarding the acceleration of poverty reduction. The purpose of the policy poor student aid program to help school-age children from poor families and household to be able to stay in school, not drop out of school and later in the future they can broke the chains of poverty that currently handcuff their family. That goal can be achieved through effective implementation, judging from the accuracy of the policy, accuracy of the implementation, accuracy of the target, accuracy of the environment and accuracy of the process. Process of the Implementation of program policy poor student aid in achieving the goals contained inhibiting factor and support factor. Based on the theory George C. Edwards III factor that support and hinder are Communication, Resources, Disposition and Bureaucratic Structure. Based on the existing barriers in the implementation of the program policy poor student aid of senior high school level in Semarang city, Author recommend as follows : (1) Make a report format which was related to student reports format recipients of aid poor students. (2) Propose he addition of personnel to be more adequate policy implementation. (3) Maximize the function of monitoring of management institutions and implementing program policies poor student aid at the local level, such as the provincial education office and the city education department of the executive apparatus at each educational unit.

Keywords : Implementation, Help Poor Students, Process, Supporting Factor, Hindering Factor

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan salah satu faktor utama bagi pengembangan sumber daya manusia, karena pendidikan diyakini mampu meningkatkan sumberdaya manusia untuk menciptakan manusia produktif yang mampu memajukan bangsanya.

Undang-undang pun telah mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh Pemerintah untuk rakyatnya. Melalui Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan dan peningkatan mutu serta relevansi pendidikan untuk menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global.

Undang-undang tersebut diterapkan melalui program Wajib Belajar Sembilan Tahun. Program tersebut dimulai dari tahun 1994 yang bertujuan untuk meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP di Indonesia. Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan perbandingan antara jumlah murid pada jenjang pendidikan tertentu (SD, SMP, SMA dan sebagainya) dengan penduduk kelompok usia sekolah.

Data SUSENAS tahun 2003 menunjukkan bahwa biaya pendidikan untuk satuan pendidikan menengah (SMP dan SMA) mencapai sekitar 2,5

kali lipat dari biaya satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar. Keadaan tersebut tentu berpengaruh pada rendahnya angka partisipasi pendidikan penduduk miskin ke satuan pendidikan yang lebih tinggi. Hal ini ditunjukkan oleh banyaknya putus sekolah dan angka tidak melanjutkan hingga ke satuan pendidikan jenjang SMA/SMK. Terjadinya putus sekolah di sebagian besar (75,7 persen) disebabkan oleh alasan ekonomi baik karena tidak memiliki biaya (67 persen) maupun anak harus bekerja (8,7 persen).

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dengan membentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang salah satu programnya adalah mengenai bantuan siswa miskin (BSM). Sejalan dengan itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengeluarkan kebijakan tentang Surat Keputusan Gubernur No. 1384/0425/2012 mengenai Pendataan dan Penetapan Siswa Calon Penerima Bantuan Siswa Miskin (BSM), yang kemudian ditindaklanjuti oleh pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Pendidikan Kota Semarang dengan Surat Keputusan No. 1804/0445/2012 tentang Pelaksanaan Program Beasiswa Miskin.

Implementasi program BSM tingkat SMA di Kota Semarang ini dinilai masih terdapat permasalahan pemberian informasi atau koordinasi dari lembaga lain seperti informasi

yang disampaikan itu mendadak, sehingga waktu untuk menginformasikan, mendata dan merekap data siswa tersebut menjadi sangat singkat. Kemudian terdapat permasalahan mengenai penentuan format laporan terkait penentuan siswa calon penerima dana BSM yang sering berubah sehingga membingungkan.

Berdasarkan Permasalahan diatas menjadikan alasan peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul “**Kajian 5 (Lima) Tepat Program Bantuan Siswa Miskin Tingkat SMA Di SMA Negeri 9 Semarang**”

B. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan dan menganalisis kondisi implementasi program Bantuan Siswa Miskin (BSM) tingkat SMA di SMA Negeri 9 Semarang berdasarkan 5 (lima) ketepatan Riant Nugroho.
2. Menjelaskan dan menganalisis faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi program Bantuan Siswa Miskin (BSM) tingkat SMA di SMA Negeri 9 Semarang.

C. Kerangka Penelitian

C.1 Implementasi Kebijakan Publik

Dalam implementasi kebijakan publik, Hal yang perlu diperlu diperhatikan yaitu mengenai prinsip-prinsip dasar bagi implementasi kebijakan yang efektif yang dikemukakan oleh Riant Nugroho (2011:650-652).

1. Ketepatan Kebijakan
2. Ketepatan Pelaksanaan
3. Ketepatan Target
4. Ketepatan Lingkungan

5. Ketepatan Proses

C.2 Teori George C. Edwards III (1980)

Dalam pandangan Edwards III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variable .yang saling berhubungan satu sama lain, yakni:

1. Komunikasi,
2. Sumber Daya,
3. Disposisi,dan
4. Struktur Birokrasi

C.3 Bantuan Siswa Miskin

Ramadhan (2014) menjelaskan bahwa program BSM merupakan program yang diluncurkan oleh pemerintah untuk menanggulangi masalah putus sekolah pada usia dini, program BSM juga dimaksudkan agar siswa miskin yang telah tamat dapat melanjutkan pendidikannya ke jenjang lebih tinggi dengan pendidikan yang layak.

D. Metode Penelitian

D.1 Desain Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif deskriptif, Penelitian kualitatif bersifat deskriptif merupakan salah satu upaya untuk menggambarkan, mendeskripsikan menganalisa kondisi-kondisi yang sedang terjadi dengan mengumpulkan data berupa transkrip interview (wawancara), catatan lapangan, foto, dokumen pribadi, dan lain-lain.

D.2 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memilih jenis penelitian Fenomenologis hal ini dikarenakan penulis melihat secara dekat melalui pengalaman para informan dalam

melaksanakan program BSM di Kota Semarang dengan melakukan wawancara terhadap beberapa informan.

D.3 Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini adalah Implementasi Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) Tingkat SMA.

D.4 Situs Penelitian

Sedangkan situs atau lokus dalam penelitian ini adalah di SMA Negeri 9 Kota Semarang.

D.5 Jenis Data

Pada penelitian ini jenis datanya dibagi kedalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis dan foto.

D.6 Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari informan melalui kegiatan wawancara.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari literatur atau sumber-sumber lain yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Dapat berasal dari berbagai literatur baik dari jurnal, artikel, makalah, data dari lembaga terkait implementasi program BSM.

D.7 Subjek Penelitian

Dalam penelitian Kajian 5 (Lima) Tepat Program BSM Tingkat SMA di Kota Semarang, terdapat beberapa informan yaitu :

1. Kepala Seksi Monitoring dan Pengembangan di Dinas Pendidikan Kota Semarang.
2. Staf Monitoring dan Pengembangan di Dinas Pendidikan Kota Semarang.
3. Guru Bimbingan Konseling dan Pengelola BSM di SMA Negeri 9 Semarang.
4. Guru di SMA Negeri 9 Semarang.
5. Siswa kelas XII IPS 2
6. Siswa kelas XII IPA 5
7. Orangtua siswa

D.8 Teknik Pengambilan Informan

Teknik pemilihan informan dalam penelitian ini adalah teknik penarikan sampel bola salju (*snowball sampling*) yaitu dimana penentuan subjek maupun informan penelitian berkembang dan bergulir mengikuti informasi atau data yang diperlukan dari informan yang diwawancarai sebelumnya.

D.9 Teknik Pengambilan data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi.

D.10 Kualitas data

Pada penelitian ini menggunakan teknik triangulasi data. Triangulasi data ini dilakukan dengan cara membandingkan data yang diperoleh dari hasil wawancara informan kunci dengan informan pendukung. Sehingga dapat mempermudah dalam penarikan kesimpulan.

D.11 Analisis Dan Interpretasi Data

1. Reduksi Data

Reduksi data bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam memahami data yang telah dikumpulkan dari lapangan melalui observasi dan wawancara yang direduksi dengan cara merangkum dan memilih hal-hal pokok dan penting sesuai fokus yang ada pada masalah dalam penelitian. Proses mereduksi data dalam penelitian ini adalah untuk mempertajam dan mengorganisasikan data dengan baik sehingga proses kesimpulan akhir dapat terlaksana dengan baik.

2. Penyajian Data

Proses penyajian data dalam penelitian ini adalah untuk menggambarkan secara umum hasil penelitian yang dimulai dari *locus* penelitian yaitu SMA Negeri 9 Semarang, pemilihan informan penelitian, dan juga mengenai proses implementasi program BSM tingkat SMA di SMA Negeri 9 Semarang.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan unsur penting dalam teknik analisa data pada penelitian kualitatif. Verifikasi ini berupa pemikiran kembali yang melintas di dalam pemikiran selama masa penulisan (penyusunan dan pengolahan data), tinjauan ulang pada catatan-catatan selama masa penelitian di lapangan, tinjauan kembali dengan seksama berupa tukar pikiran dengan para ahli untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif, serta dengan membandingkan dengan temuan-temuan data lain yang berkaitan dengan implementasi program BSM.

PEMBAHASAN

A. Proses Implementasi Program Bantuan Siswa Miskin Tingkat SMA di Kota Semarang.

1. Ketepatan Kebijakan

Ketepatan kebijakan melihat bagaimana sebuah kebijakan/program dapat menyelesaikan masalah dan dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Ketepatan kebijakan dapat dinilai melalui aspek-aspek terkait program BSM tersebut, seperti : latar belakang permasalahan sehingga muncul program BSM, apakah program BSM dapat mengatasi permasalahan tersebut dan sejauh mana program BSM mampu memecahkan masalah bagi siswa penerima BSM.

2. Ketepatan Pelaksanaan

Ketepatan pelaksanaan melihat bagaimana ketepatan lembaga atau aktor yang diberikan wewenang untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Lembaga pelaksana dalam implementasi program BSM tingkat SMA adalah ; Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Atas, Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten, Sekolah dan Bank penyalur. Program BSM tingkat SMA dijalankan melalui ketentuan atau panduan khusus yang telah dibuat oleh Direktorat Jenderal Pendidikan yang berupa petunjuk teknis dalam menjalankan program BSM.

3. Ketepatan Target

Ketepatan target dalam implementasi program BSM tingkat SMA di Kota Semarang ini berkaitan dengan kesesuaian target/sasaran penerima BSM tersebut, masalah dalam menentukan target/sasaran, manfaat yang diberikan oleh program

tersebut kepada target penerima program BSM, dan penggunaan dana bantuan oleh target/sasaran penerima BSM.

4. Ketepatan Lingkungan

Ketepatan Lingkungan ini terdiri dari dua lingkungan yang menentukan efektifitas implementasi program BSM tingkat SMA di Kota Semarang yaitu lingkungan endogen dan lingkungan eksogen.

Pertama, lingkungan endogen yaitu interaksi antar pihak-pihak atau lembaga yang membuat kebijakan/program dengan lembaga pelaksana program BSM tersebut.

Kedua, yaitu lingkungan eksogen mengenai pendapat atau persepsi publik terkait implementasi program BSM tingkat SMA di Kota Semarang. Pada lingkungan eksogen ini, persepsi-persepsi publik dapat dilihat melalui beberapa indikator pertanyaan terkait kondisi sosial penerima BSM, kondisi ekonomi penerima BSM dan juga tanggapan mereka terhadap program BSM tersebut, serta harapan mereka terkait program BSM.

5. Ketepatan Proses

Efektifitas implementasi program BSM yang terakhir dapat dilihat melalui ketetapan proses yang terdiri dari ; *Policy Acceptence*, *Policy Adaption*, dan *Policy Readiness*.

Pertama, *Policy Acceptence* adalah pemahaman instansi/lembaga sebagai pelaksana program terhadap BSM tersebut. Pemahaman disini adalah pemahaman terkait peran dan fungsi dari lembaga pelaksana program BSM.

Kedua, *Policy Adoption* bukan hanya sebagai tahap memahami program saja, melainkan sudah masuk pada tahap kesiapan dari para lembaga pelaksana program untuk menjalankan program tersebut.

Ketiga, *Policy Readiness* adalah tahapan dimana para aktor siap untuk

melaksanakan tugas mereka terkait implementasi program BSM tingkat SMA di Kota Semarang. Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang No. 1804/0445/2012 Tentang Pelaksanaan Program Beasiswa Miskin Kota Semarang, maka dimulailah tugas mereka untuk menjalankan kebijakan tersebut.

B. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Program BSM Tingkat SMA Di Kota Semarang

1. Komunikasi

Pertama, kejelasan informasi yang diberikan kepada aktor pelaksana program haruslah jelas, sehingga memudahkan dalam menjalankan program BSM tersebut. Informasi yang diberikan kepada aktor pelaksana program BSM berasal dari pusat dan disampaikan kepada aktor disetiap lembaga pelaksana melalui koordinasi antar lembaga.

Kedua, konsistensi informasi yang disampaikan oleh implementor ini terkait ketetapan bentuk informasi yang diberikan oleh implementor.

Ketiga, penyampaian informasi menyangkut media apa saja yang digunakan dalam melaksanakan program BSM. Penggunaan media yang tepat dalam pelaksanaan kebijakan akan membawa dampak pada kejelasan informasi yang akan disampaikan.

2. Sumberdaya

Pertama, sumberdaya manusia dari segi kualitas. Kualitas sumberdaya manusia akan mempengaruhi pelaksanaan program.

Kedua, sumberdaya manusia dari segi kuantitas. Pelaksanaan sebuah

program pasti memerlukan jumlah personil yang mencukupi.

Ketiga, wewenang. Dalam program BSM tingkat SMA di Kota Semarang ini yang dimaksud dengan wewenang adalah meliputi tugas, peran dan fungsi dari aparatur pelaksana program BSM tersebut.

Keempat, fasilitas. Dalam program BSM ini yang dimaksud dengan fasilitas adalah berupa sarana atau prasarana pendukung yang diberikan oleh pemerintah dalam menjalankan program BSM tingkat SMA di Kota Semarang.

3. Disposisi

Pertama, komitmen aparatur pelaksana program. Hal ini akan mempengaruhi efektifitas dari pelaksanaan kebijakan tersebut. Hal ini dapat dilihat dengan sikap implementor (pelaksana kebijakan) yang cenderung aktif dan sering terlibat selama pelaksanaan kebijakan tersebut berlangsung.

Kedua, intensitas koordinasi. Intensitas koordinasi dapat diartikan sebagai tingkat komunikasi yang terjadi antar lembaga pelaksana program. Tingkat komunikasi tersebut dapat dilihat dengan cara seberapa sering para aktor pelaksana kebijakan saling bertemu atau interaksi.

4. Struktur Birokrasi

Pertama, tugas pokok dan fungsi yang dimiliki oleh implementor. Pembagian tugas pokok dan fungsi ini dapat berjalan efektif apabila sudah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih tugas dan fungsi yang dimiliki masing-masing lembaga terkait implementasi program BSM tingkat SMA di Kota Semarang.

Kedua, standar operasional prosedur (SOP). Hal ini merupakan pedoman mengenai tata cara atau tahapan dalam melaksanakan suatu program yang ada, sehingga dapat membantu menjalankan suatu program yang efektif.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Proses Implementasi Program BSM Tingkat SMA Di Kota Semarang.

Proses implementasi program BSM tingkat SMA di Kota Semarang dapat dinilai efektif melalui pengukuran dengan lima ketepatan, yaitu ; ketepatan kebijakan, ketepatan pelaksanaan, ketepatan target, ketepatan lingkungan dan ketepatan proses.

Ketetapan kebijakan, program BSM dapat dikatakan sudah mampu menjawab persoalan mengenai proses pelaksanaan program BSM tingkat SMA di Kota Semarang. Dalam proses implementasi program BSM tingkat SMA di Kota Semarang, aparatur pelaksana program telah mengetahui tujuan dari program BSM, aparatur pelaksana telah mampu mengetahui permasalahan yang menjadi latar belakang keluarnya program BSM, program BSM dinilai telah mampu mengatasi permasalahan bagi siswa miskin yang menjadi penerima BSM, dan aparatur pelaksana program telah mampu mengetahui jangkauan pemecahan masalah bagi siswa penerima BSM.

Ketetapan pelaksanaan dalam program BSM tingkat SMA di Kota Semarang ini dapat dinilai sudah baik. Karena aparatur pelaksana telah mengetahui lembaga-lembaga pelaksana terkait implementasi program BSM tingkat SMA di Kota Semarang, telah terdapat kesesuaian

antara lembaga pelaksana program dengan peran dan fungsinya, dan aparatur pelaksana kebijakan telah mampu mengetahui tugas dan wewenang dari lembaga pelaksana program BSM tingkat SMA di Kota Semarang.

Ketepatan target dalam implementasi program BSM tingkat SMA di Kota Semarang ini juga dapat dinilai baik dan sudah tepat. Karena target penerima BSM dinilai sudah tepat, program BSM dirasa telah memberikan manfaat bagi siswa penerima BSM, terdapat kesesuaian antara penggunaan dana bantuan dengan tujuan dari program BSM.

Ketepatan lingkungan dalam implementasi program BSM tingkat SMA di Kota Semarang dapat dikatakan baik, karena adanya proses interaksi antar lembaga pelaksana program dan mampu mengetahui persepsi serta harapan publik terkait implementasi program BSM tingkat SMA di Kota Semarang.

Ketepatan proses dalam implementasi program BSM tingkat SMA di Kota Semarang juga dapat dikatakan baik. Karena aparatur pelaksana program BSM tersebut telah mengetahui peran dan fungsinya, aparatur pelaksana program telah siap menjalankan kebijakan program BSM tersebut, dan kondisi implementasi program BSM tingkat SMA di Kota Semarang dapat dinilai baik, karena tidak terjadi permasalahan selama proses implementasi program BSM tersebut berlangsung.

Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Program BSM Tingkat SMA Di Kota Semarang.

A. Faktor Pendukung Dalam Implementasi Program BSM Tingkat SMA Di Kota Semarang.

1) Komunikasi

Dalam komunikasi terdapat indikator yang menjadi pendukung atau pendorong dalam implementasi program BSM tingkat SMA di Kota Semarang, yaitu mengenai informasi yang diberikan oleh lembaga pembuat kebijakan yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dirasa sudah jelas sehingga mudah dipahami oleh aparatur pelaksana program BSM, baik aparatur yang berada di Dinas Pendidikan Kota Semarang maupun di SMA Negeri 9 Semarang.

2) Sumberdaya

Hal-hal yang menjadi pendorong tersebut seperti : kualitas aparatur pelaksana program BSM dirasa sudah memenuhi kriteria karena rata-rata telah berpendidikan S-1, informasi yang diberikan cukup mudah dipahami dan dimengerti karena terdapat petunjuk-petunjuk yang diberikan dalam melaksanakan program BSM, aparatur pelaksana program BSM telah mengerti akan wewenang mereka terkait tugas dan tanggung jawabnya terhadap pelaksanaan program BSM.

3) Disposisi

Disposisi atau sikap dari aparatur pelaksana program BSM tingkat SMA di Kota Semarang juga dapat menjadi faktor pendorong dalam implementasi program BSM tingkat SMA di Kota Semarang, karena aparatur pelaksana program BSM di Kota Semarang dinilai sudah berkomitmen dalam melaksanakan tugas yang diberikan terkait pelaksanaan program BSM. Sehingga program BSM dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan atau petunjuk-petunjuk yang telah

ditetapkan oleh lembaga pembuat program BSM.

4) Struktur Birokrasi

Struktur Birokrasi menjadi faktor pendorong dalam implementasi program BSM tingkat SMA di Kota Semarang, karena aparatur pelaksana program BSM telah mengerti akan tupoksi mereka dan sudah terdapat standar operasional prosedur (SOP) berupa buku pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan program yang mampu memberikan kemudahan kepada aparatur pelaksana program BSM dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam proses implementasi program BSM tingkat SMA di Kota Semarang.

B. Faktor Penghambat Dalam Implementasi Program BSM Tingkat SMA Di Kota Semarang.

1) Komunikasi

Dalam penelitian ini yang menjadikan komunikasi sebagai faktor penghambat adalah karena terdapat ketidak-konsistenan terhadap bentuk/format laporan siswa calon penerima BSM. Hal ini terjadi karena tidak adanya format yang baku terkait format laporan siswa calon penerima BSM, sehingga membuat kebingungan aparatur pelaksana program yang membuat laporan tersebut yaitu aparatur yang berada pada satuan pendidikan (sekolah).

2) Sumberdaya

Dalam penelitian ini yang menjadikan penghambat adalah mengenai jumlah personil terkait pelaksanaan program BSM dirasa masih kurang sesuai, karena aparatur pelaksana pada lembaga satuan pendidikan (sekolah) merasa membutuhkan tenaga atau personil tambahan dalam melaksanakan

program BSM tingkat SMA di Kota Semarang. Pada SMA Negeri 9 hanya terdapat satu orang personil yang menjadi pelaksana program BSM yang melakukan tugas dari mulai tahap sosialisasi, pendataan dan koordinasi antar lembaga terkait implementasi program BSM tingkat SMA di Kota Semarang.

Selain itu, terdapat pula faktor yang menghambat dalam implementasi program BSM tingkat SMA di Kota Semarang, mengenai tidak adanya fasilitas pendukung yang diberikan oleh pemerintah terkait implementasi program BSM. Setiap aparatur pelaksana program BSM tingkat SMA di Kota Semarang hanya menggunakan fasilitas yang terdapat pada lembaga mereka saja, seperti telepon, faksimili ataupun internet untuk melakukan koordinasi dan untuk memberikan informasi kepada lembaga lain.

3) Disposisi

Faktor yang dapat menjadi penghambat lainnya dalam implementasi program BSM tingkat SMA di Kota Semarang adalah mengenai disposisi/sikap dari aparatur pelaksana program BSM. Intensitas koordinasi antar lembaga yang dirasa masih kurang, karena hanya terdapat dua kali proses koordinasi yang dilakukan oleh lembaga pelaksana kebijakan yaitu antara Dinas Pendidikan Kota Semarang dengan satuan pendidikan (sekolah) dalam satu periode. Dengan minimnya intensitas koordinasi dari lembaga pelaksana program tersebut, maka akan berdampak pada rendahnya tingkat komunikasi yang terjadi selama proses implementasi program BSM berlangsung, sehingga dapat menimbulkan kesalah-pahaman (*missed communication*) dalam menyampaikan atau menerima

informasi terkait kebijakan program BSM tersebut.

B. Saran

Permasalahan Ketidak-konsistenan Format Laporan Siswa Calon Penerima BSM.

Untuk permasalahan ini disarankan agar dibuat format laporan yang tetap dan baku terkait format laporan siswa calon penerima BSM oleh lembaga yang berwenang seperti Dinas Pendidikan Kota Semarang, sehingga informasi yang disampaikan dapat menjadi lebih efektif dan efisien, serta memudahkan aparatur pelaksana yang bertugas dalam membuat laporan terkait calon penerima BSM.

Permasalahan Jumlah Personil Pelaksana Yang Dirasa Masih Kurang Sesuai.

Terkait dengan permasalahan jumlah personil disarankan agar aparatur pelaksana yang masih merasa terbebani dalam melaksanakan program BSM tersebut memberikan surat keterangan pengajuan kepada pihak yang berwenang agar dapat menambahkan jumlah personil yang memadai, sehingga dapat memberikan kemudahan kepada aparatur pelaksana dalam melaksanakan tugasnya terkait implementasi program BSM tingkat SMA di Kota Semarang.

Permasalahan Tidak Adanya Fasilitas Pendukung Dari Pemerintah.

Untuk permasalahan ini sebenarnya tidak terlalu *urgent* untuk diprioritaskan. Karena dengan fasilitas yang telah tersedia di setiap lembaga pelaksana program BSM tingkat SMA di Kota Semarang seperti telepon, fax dan internet untuk mengakases dan

memberikan informasi terkait program BSM telah dimiliki oleh setiap lembaga.

Permasalahan Kurangnya Intensitas Koordinasi Antar Lembaga Pelaksana Program.

Untuk permasalahan ini direkomendasikan agar lembaga pelaksana program di daerah seperti Dinas Pendidikan Provinsi atau Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dapat memaksimalkan perannya dalam memonitoring keadaan tiap-tiap sekolah selama proses implementasi program BSM tersebut berlangsung. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk meminimalisir kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian informasi terkait implementasi program BSM dan dapat mengintensifkan koordinasi atau interaksi antar aparatur pelaksana yang ada di tiap-tiap lembaga pelaksana program BSM tingkat SMA di Kota Semarang.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku :

- Agustino, Leo. 2006. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung : Alfabeta
- Bungin, Burhan. 2005. Analisis Data Penelitian Kualitatif. Jakarta : PT Raja Grafindo

- Bungin, Burhan. 2008. Penelitian Kualitatif. Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta : Kencana
- Danim, Sudarwan. 2002. Menjadi Peneliti Kualitatif. Bandung : Pusaka Setia
- Dunn, William. 2008. Pengantar Analisis Kebijakan Publik (edisi kedua). Yogyakarta : Gajah Mada University Press
- Faisal, Sanapiah. 1990. Penelitian Kualitatif dasar-dasar dan aplikasi. Malang : IKIP YA3
- Jones, Charles. O. 1994. Pengantar Kebijakan Publik. Jakarta : PT Raja Grafindo
- Keban, Yeremias T. 2008. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik (Konsep, Teori dan Isu). Yogyakarta : Gava Media
- Kunaryo, Hadi Kusumo. Pengantar Pendidikan. Semarang : IKIP Semarang Press
- Kusumanegara, Solahuddin. 2010. Model dan aktor dalam Kebijakan Publik. Yogyakarta : Gava Media
- Moleong, Lexy. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : Remaja Rosdakarya
- Nugroho, Riant. 2011. Public Policy (Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan. Jakarta : Kencana
- Pasolong, Harbani. 2008. Teori Administrasi Publik. Bandung : Alfabeta
- Saebeni, Beni Ahmad. 2008. Metode Penelitian. Bandung : Pustaka Setia
- Soehartono, Irawan. 2004. Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Lainnya. Bandung : Remaja Rosda Karya
- Subarsono, AG. 2005. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R & D. Bandung : Alfabeta
- Syafiie, Inu Kencana. 2006. Ilmu Administrasi Publik. Jakarta : PT Asdi Mahasatya
- Usman, Husaini. Purnomo, Setiadi A. 2008. Metode Penelitian Sosial. Jakarta : Kencana
- Wahab, Abdul Solichin. 2002. Analisis Kebijaksanaan. Jakarta : Bumi Aksara

Sumber Jurnal :

- Fakthurrohman, Moch. 2014. Peran Pemerintah Dalam Memberikan Akses Pendidikan Kepada Masyarakat Miskin Di Kota Malang. *Jurnal*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Brawijaya) Dalam https://www.academia.edu/Documents/in/Peran_Pemerintah_Dalam_Memberikan_Akses_Pendidikan_Kepada_Masyarakat_Miskin_Dikota_Malang Diunduh pada 7 Mei 2015 pukul 08.35 WIB
- Ramadhan, Ghafuur Kharisma. 2014. Implementasi Bantuan Siswa Miskin Sekolah Dasar (BSM SD) Di Kecamatan Sambas. *Jurnal*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Tanjungpura) Dalam http://jurnafis.untan.ac.id/index.php/governance/article/view/539/pdf_13 diunduh pada 12 September 2015 pukul 23.00 WIB

Santoso, Heru Mahmudi. 2013. Pengelolaan Bantuan Siswa Miskin Di SMP Muhammadiyah 8 Wonogiri. Jurnal. Pendidikan Ilmu Sosial. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dalam <http://eprints.ums.ac.id/32515/22/Naskah%20Publikasi.pdf> Diunduh pada 7 Mei 2015 pukul 08.15 WIB

Ulfah, Metalia. 2013. Evaluasi Pelaksanaan Program Beasiswa Miskin (BSM-SMA/SMK) Di SMK Asshodihiyah Semaarang. Jurnal. Jurusan Ilmu Pemerintahan. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Diponegoro. Dalam <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/3579/3489> diunduh pada 7 Mei 2015 pukul 08.30 WIB

Wedasari, Made. 2013. Implementasi Bantuan Siswa Miskin Di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga : Studi Program Bantuan Siswa Miskin Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri. Jurnal. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Sebelas Maret. Dalam https://eprints.uns.ac.id/12660/1/328822611201301521_unprotected.pdf Diunduh pada 7 Mei 2015 pukul 09.00 WIB

Sumber Internet :

Angka Partisipasi Kasar Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003-2013 dalam <http://www.bps.go.id/linkTabelStatIs/view/id/1528> diakses pada tanggal 27 Oktober 2015, 21.35 WIB

Definisi Bantuan Siswa Miskin dalam <http://www.docfoc.com/draft-panduan-bsm-2014> Diakses pada 3 Oktober 2015 pukul 20.05 WIB

Pengertian pendidikan dalam <http://www.seputarpengetahuan.co>

m/2015/02/15-pengertian-pendidikan-menurut-para.html diakses pada tanggal 27 Oktober 2015, 21.30 WIB

Target sasaran penerima BSM tahun 2014 dalam <http://jateng.tribunnews.com>, 23 Maret 2015

Tim nasional percepatan penanggulangan kemiskinan dalam <http://www.tnp2k.go.id/id/tanya-jawab/klaster-i/program-bantuan-siswa-miskin-bsm>, diakses tanggal 12 April 2015, Pukul 20.00 WIB

Sumber Dokumen :

Dinas Pendidikan Kota Semarang mengenai Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang No. 1804/0445/2012 tentang Pelaksanaan Program Beasiswa Miskin Kota Semarang

Juknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA 2015.pdf

Data SUSENAS Tahun 2003

Sofianty, Winda. 2015. Implementasi Kebijakan Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) Tingkat SMP Di Kota Semarang. Skripsi. Universitas Diponegoro